

Mitigasi Bencana Sosial Dengan Penguatan Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Bali Widodo ^{a,1}, Yogi Nugraha ^{b,2}

^a Institut Teknologi Nasional, Indonesia

^b Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

¹ baliw@itenas.ac.id*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk karena dibangun atas keberagaman suku, budaya, dan agama. Kemajemukan berpotensi untuk melahirkan adanya bencana sosial berupa konflik horizontal yang mengatasnamakan agama. Oleh sebab itu perlu dicari strategi pembelajaran agar hal tersebut dapat diminimalisir. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penguatan moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat meminimalisir terjadinya bencana sosial. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, hal ini untuk memperoleh gambaran di lapangan secara alamiah yang ilmiah terhadap fenomena yang dikaji. Pengumpulan data dengan melakukan observasi tidak langsung melalui media elektronik dan metode library research dimana data diperoleh dari berbagai sumber penelitian terdahulu, artikel yang relevan dengan topik. Studi sejarah juga digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kembali semangat kebangsaan yang muncul sebelum merdeka. Analisis dari pembahasan menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama mempunyai dampak yang besar untuk menjaga keharmonisan ditengah perbedaan keyakinan di kalangan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terutama sila Ketuhanan dan Kemanusiaan harus dipraktikkan dalam sikap dan perilaku setiap warga negara agar tercipta masyarakat yang saling menghormati, saling memahami, dan hidup dalam kerukunan sebagai suatu bangsa di negeri yang Baldatun Toyyibatun Warrobbun Ghafur.

ABSTRACT

The Indonesian nation is known as a pluralistic nation because it is built on ethnic, cultural and religious diversity. Plurality has the potential to give birth to social disasters in the form of horizontal conflicts in the name of religion. Therefore, it is necessary to look for learning strategies so that this can be minimized. This study aims to find out how much influence strengthening religious moderation in Citizenship Education learning can minimize the occurrence of social disasters. This research was carried out using a descriptive qualitative approach, this was to obtain a natural, scientific picture in the field of the phenomenon being studied. Collecting data by carrying out indirect observations through electronic media and library research methods where data is obtained from various sources of previous research, articles relevant to the topic. Historical studies are also used in this research to look back at the national spirit that emerged before independence. Analysis of the discussion shows that strengthening religious moderation has a big impact on maintaining harmony amidst differences in beliefs among Indonesian society. The values of Pancasila, especially the principles of God and Humanity, must be practiced in the attitudes and behavior of every citizen in order to create a society that respects each other, understands each other, and lives in harmony as a nation in a country that is Baldatun Toyyibatun Warrobbun Ghafur.

Pendahuluan

Keberagaman yang melatar belakangi adanya bangsa Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Keberagaman yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa ini seharusnya disyukuri dan dapat diterima oleh setiap warga negara dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain,

Informasi Artikel

Diterima : 08 Januari 2025

Disetujui : 04 Februari 2025

Kata kunci:

Mitigasi Bencana, Moderasi Beragama, Pendidikan Kewarganegaraan

Article's Information

Received: 08 January 2025

Accepted: 04 February 2025

Keywords:

Disaster Mitigation, Religious Moderation, Citizenship Education

karena ketika perbedaan tidak dapat diterima tentu akan menimbulkan masalah yang salah satunya menyebabkan hubungan sosial menjadi disharmoni bahkan dapat berujung pada konflik sosial. Heterogenitas etnis, religi, budaya maupun bahasa yang ada pada bangsa Indonesia potensial memunculkan instabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Junaedi, 2019).

Kemampuan setiap warga negara dalam memaknai dan menyikapi perbedaan ini tidak sama, ada yang mengatakannya sebagai suatu kelebihan dibanding bangsa lain karena keberagaman berarti kaya akan budaya, bahasa, dan agama, tetapi ada juga yang mengatakannya sebagai kekurangan karena jika tidak dikelola dengan baik akan melahirkan sikap intoleransi, radikalisme bahkan terorisme (Syahruman & Mulyana, 2021)

Konflik sosial sebagai bentuk bencana sosial bermotifkan perbedaan agama yang terjadi selama ini tentu bukan merepresentasikan perilaku semua kelompok atau golongan masyarakat Indonesia, ini hanya kehendak sekelompok kecil orang saja yang anti perbedaan yang biasa disebut kelompok intoleran, yang anti perbedaan, selalu menilai kelompok yang lain salah, menganggap dirinya paling benar. Yang sering terjadi diskriminasi agama yang berkaitan dengan masalah perbedaan dalam berkeyakinan atau beragama. Perbedaan dalam beragama ini seringkali menimbulkan perlakuan tidak pantas seperti merusak rumah ibadah, mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah yang justru dilakukan oleh mereka yang mengklaim sebagai orang yang taat beragama. Beberapa waktu yang lalu pernah terjadi perusakan dan pembakaran masjid yang dilakukan oleh sekelompok massa di sebuah musholla yang ada di Karubaga Kabupaten Tolikara, Papua. Sementara di Aceh Singkil terjadi pembakaran Gereja HKI Suka Makmur yang disinyalir tidak memiliki izin mendirikan rumah ibadah. Sedangkan yang baru-baru terjadi adalah pembubaran ibadah dari mahasiswa Katolik yang sedang berlangsung. Kejadian tersebut tentu membuat situasi menjadi tidak kondusif dan merusak keharmonisan hubungan umat beragama yang sudah baik. Masalah ini salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan dalam memaknai ajaran agama itu sendiri yang menyebabkan kehilangan orientasi dalam mengimplementasikan ajaran agamanya (BM, 2014)

Sampai hari ini pun perbincangan tentang kerukunan antar umat beragama selalu saja menjadi topik perbincangan hangat di kalangan akademisi, tokoh agama, maupun masyarakat pada umumnya. Masalah kerukunan antar umat beragama di masyarakat Indonesia ini terkesan merupakan sesuatu yang masih mahal harganya, terkesan susah didapat. Ibarat suatu barang yang mahal harganya sehingga tidak semua orang dapat membeli dan memilikinya. Demikian pula halnya dengan kerukunan antar umat beragama ini. Sikap dan tindakan intoleransi masih sering terjadi dan ditunjukkan oleh kelompok-kelompok yang tidak menyukai adanya perbedaan dalam berkeyakinan atau berkepercayaan. Ironisnya lagi hal tersebut justru dilakukan oleh orang yang katanya mengerti betul tentang ajaran agamanya. Kelompok inilah yang seringkali mengatasnamakan agama justru malah mengabaikan nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan yang luhur serta merusak keharmonisan kehidupan umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik (Hasan, 2021)

Perbedaan latar belakang suku, ras, agama dan antar golongan sering kali menjadi penyebab atau pemicu adanya konflik sosial (Akhmadi, 2019, 46). Pemahaman tentang bangsa dan negara Indonesia yang dibangun atas perbedaan bukan persamaan ini di sebagian kalangan masyarakat masih rendah. Sehingga toleransi akan perbedaan yang selama ini ditunjukkan terkesan semu, artinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Memang harus diakui pula bahwa sikap dan tindakan intoleransi ini tidak bisa di generalisir, masih banyak warga masyarakat yang masih menghargai perbedaan, bahwa keragaman suku, adat, budaya, dan agama merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Pencipta yang harus diterima dan tidak bisa ditawar (*taken for granted*), dengan menghargai perbedaan itu sebenarnya secara tidak langsung telah menghargai karya Tuhan (Abror, 2020, 144).

Konflik yang berdasar kepentingan golongan dan ideologi yang semakin meruncing dapat mengarah pada konflik antar kelompok maupun antar umat. Keberagaman yang selama ini dibangga-

banggakan dapat berubah menjadi sosok yang menakutkan karena dapat mengancam ketahanan nasional bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya bahkan pertahanan keamanannya, ini berarti mengarah kepada disintegrasi bangsa maupun wilayah.

Menyikapi fenomena di atas, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh agar disintegrasi bangsa tidak terjadi, salah satunya melalui jalur pendidikan. Dalam pandangan Darmalaksana, 2018 Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan karakter dapat berperan besar bagi pembentukan karakter religius bangsa ditengah heterogenitas masyarakat Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pendidikan nilai dan karakter dapat menjadi wadah pembentukann karakter religius warga negara muda. Dalam proses pembelajarannya dapat dijadikan tempat berdiskusi tentang segala persoalan yang dihadapi bangsa ini. Mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis tentang permasalahan atau isu-isu sentral yang terjadi di masyarakat yang butuh penyelesaian cepat. Mahasiswa belajar untuk ikut bertanggungjawab dan peduli terhadap masa depan bangsa. Selain itu diperlukan juga sinergitas antara dunia pendidikan dengan masyarakat, karena keduanya tidak bisa dipisahkan dalam mentransformasikan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik dan masyarakat luas (Sutrisno, 2020, 54). Namun demikian, anggapan bahwa pembentukan nilai dan karakter peserta didik merupakan tugas dan tanggung jawab dari lembaga pendidikan saja tidaklah sepenuhnya benar, karena pendidikan nilai dan karakter religius juga dapat juga dilakukan di lingkungan nonformal. Mereka bisa belajar dari lingkungan dimana mereka tinggal.

Terkait dengan upaya mitigasi bencana sosial khususnya yang bernuansa agama, perlu dicari materi dan model pembelajaran yang lebih efektif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar mahasiswa dapat memahami arti perbedaan dan menambah wawasan tentang resolusi konflik terhadap permasalahan sosial yang muncul. Untuk materi pembelajaran bisa dijadikan sebagai pokok bahasan tentang Moderasi Beragama dan untuk model pembelajaran bisa dengan berbasis masalah atau proyek.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur dan sejarah. Studi literatur dengan mengkaji berbagai pustaka seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal yang ada hubungannya tema penelitian ini. Sedangkan studi sejarah untuk mengkaji kembali dan menafsirkan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu untuk menambah pengetahuan dan menyimpulkan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu, khususnya hasil diskusi dari para pendiri negara (founding father) yang terjadi pada saat sidang BPUPK Indonesia antara golongan agama dan golongan nasionalis/kebangsaan.

Hasil dan Pembahasan

Mitigasi Bencana Sosial

Dalam UU No. 24 Tahun 2007, bencana diartikan sebagai “suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa yang bisa mendatangkan kerugian baik materiel maupun immaterial. Kerugian material berupa rusaknya fasilitas umum yang selama ini digunakan oleh masyarakat seperti misalnya jalan, jembatan, maupun yang berkaitan dengan bangunan fisik lainnya, sedangkan kerugian yang sifatnya immaterial yaitu dengan hilangnya nyawa manusia serta dampak psikologis yang ditimbulkan berupa trauma atas peristiwa yang dialami yang mana hal ini tidak bisa dihargai dengan materi semata.

Bencana yang disebabkan oleh faktor manusia dapat disebut juga sebagai bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang merupakan perbuatan manusia misalnya berupa konflik horizontal yang dilatar belakangi hanya karena perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan sosial.

Penyebab konflik horizontal yang masih saja terjadi di Indonesia belakangan ini lebih karena faktor perbedaan keyakinan atau agama. Tentu yang dimaksud disini bukan konflik atau perang antar agama karena pada dasarnya tidak ada satupun agama yang mengajarkan umatnya untuk saling menyerang, bermusuhan apalagi saling membinasakan. Jika masih ada yang beranggapan bahwa mereka yang agamanya berbeda dengannya berarti musuhnya, dapatlah dikatakan pemahaman mereka akan agamanya belum begitu mendalam sehingga aura yang keluar dari dalam dirinya aura yang membenci sesama, sebaliknya jika mereka mendalami betul agamanya maka aura yang keluar dari dalam dirinya adalah aura yang mengasihi sesamanya sebagai saudara secara kemanusiaan.

Permusuhan diantara sesama umat manusia jelas di semua agama tidak diperbolehkan artinya agama melarang untuk saling bermusuhan. Dalam QS Al-Anfal ayat 61 dinyatakan "Allah membenci perlakuan buruk oleh manusia kepada manusia lainnya, termasuk diantaranya adalah permusuhan". Dalam ajaran agama Kristen dan Katolik juga melarang umatnya untuk saling bermusuhan, hal ini dinyatakan dalam injil Matius 22 ayat 39: "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri". Berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci dan bermusuhan. Perbedaan keyakinan tidak berarti saling bermusuhan, sebaliknya bisa menjadi saudara. Saudara sebagai warga satu negara (*wathoniah*) maupun saudara sebagai sesama manusia (*basyariah*).

Secara sederhana dapatlah dilihat bahwa meskipun secara agamanya berbeda tetapi Penciptanya bisa saja sama. Hal bisa terlihat dari hasil ciptaan-Nya dimana semua manusia memiliki anggota tubuh atau organ yang sama meskipun secara agamanya berbeda-beda. Seandainya ada yang beranggapan jika beda agama maka beda pula penciptanya mestinya hasil ciptaannya juga berbeda. Misalnya umat agama A dengan Tuhannya A manusia ciptaannya kakinya enam, umat agama B dengan Tuhannya B manusia ciptaannya matanya ada empat, umat agama C dengan Tuhannya C tangannya ada delapan, jadi ciptaannya harus berbeda satu sama lainnya, tetapi kenyataannya yang terlihat tidak demikian, yang terlihat apapun agamanya secara fisiknya sama, dan ini tidak hanya diluarnya saja juga organ yang ada didalam tubuh masing-masing umat beragamapun sama secara jumlah dan letaknya juga sama. Yang membedakannya hanyalah bentuk, ukuran, warna, dan jenis kelaminnya saja. Misalnya tentang rambut, ada rambut yang bentuknya keriting, lurus, ikal, ukuran rambutnya ada yang panjang ada yang pendek, warna rambutnya ada yang hitam, putih, pirang dan jenis kelaminnya ada yang pria dan wanita.

Di dalam kitab suci Al-Quran juga bisa dibaca dalam QS Al-Hujurat ayat 13 yang artinya "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan Perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa". Berdasarkan surat Al-Hujurat tersebut dapat dipahami bahwa manusia itu berawal dari sepasang manusia laki-laki dan perempuan yang kemudian daripadanya menjadi banyak bangsa di dunia ini seperti adanya bangsa Arab, bangsa Palestina, bangsa Amerika, juga ada diantaranya bangsa Indonesia, kemudian dari setiap bangsa tersebut menjadi bersuku-suku. Bangsa Indonesia sendiri memiliki ratusan suku bangsa, diantaranya ada suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, suku Madura, dan lainnya.

Keberagaman suku, budaya, dan keyakinan atau agama merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia, hal ini harus senantiasa disyukuri karena itu semua merupakan karya dan anugerah Tuhan Yang Maha Pencipta kepada bangsa Indonesia.

Negara dan bangsa Indonesia ini dibangun atas keberagaman bukan atas keseragaman. Ini yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa bangsa Indonesia dibentuk atas perbedaan suku, budaya, ras, dan agama. Perbedaan yang ada memang tidak bisa di samakan tetapi perbedaan tersebut dapat disatukan, dan yang bisa menyatukan bangsa ini sekarang dan semoga selamanya adalah Pancasila yang dijadikan sebagai falsafah hidup dan Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk itulah keberadaan Pancasila ini harus dijaga jangan sampai ada upaya orang atau sekelompok orang yang ingin merubah atau menggantinya dengan dasar negara yang lain. Dalam sejarah bangsa Indonesia pernah ada upaya untuk mengganti dasar negara yang dilakukan oleh Sekarmaji Maridjan Kartosuwiryo dengan DI/TII nya dimana beliau ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar agama (negara Islam), juga yang dilakukan oleh Dipa Nusantara Aidit atau lebih dikenal dengan DN Aidit yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Keduanya di ditumpas karena apa yang mereka perjuangkan berbeda dengan semangat dari para pendiri negara bahwa negara Indonesia tidak akan mengarah kepada pembentukan negara agama (Islam), negara sekuler juga negara Komunis tetapi yang ingin dituju adalah negara yang Theis Demokrasi, yaitu negara yang mengakui adanya Tuhan YME dan membebaskan setiap warga negaranya untuk memilih dan beribadah sesuai dengan agama yang diimaninya tanpa paksaan.

Negara Indonesia adalah negara yang beragama bukan negara agama, hal ini bisa dilihat pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan bukan negara sekuler yang memisahkan sama sekali urusan negara dengan agama dapat dibaca dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.

Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah cara beragama yang menempatkan dirinya pada posisi berada di tengah, artinya posisi seseorang dalam beragama ini tidak berpandangan jelek terhadap umat beragama lain, dan tidak terlalu fanatik bahkan berlebihan saat dirinya menjalankan ajaran agamanya itu. Moderasi beragama ini penting dalam konteks negara Indonesia yang beragam agamanya dengan memegang komitmen menjaga keutuhan bangsa, menjauhkan tindakan kekerasan, menerima perbedaan tradisi atau adat yang ada di setiap masyarakat adat, serta mengedepankan toleransi. Sikap yang tidak bisa menerima perbedaan atau intoleransi dapat mengarah pada tindakan radikalisme bahkan berujung pada terorisme. Untuk itulah sikap intoleransi ini harus dilenyapkan di tengah kehidupan bangsa yang heterogen ini.

Moderasi beragama bukan agamanya yang dimoderasi tetapi cara pandang orang tentang agama itu yang harus dimoderasi agar moderat jangan sampai mengarah kepada perilaku yang ekstrem, tidak adil dengan sesama umat beragama, bahkan implementasi terhadap ajaran agamanya pun bisa secara berlebih-lebihan.

Umumnya faktor pemicu adanya konflik itu agama, yang sangat punya andil atau kontribusi yang cukup besar sebagai faktor penyebabnya. Konflik mendatangkan kerugian bagi semua pihak dan menurunkan prestasi bangsa Indonesia bahkan menyebabkan menurunnya stabilitas keamanan. Intinya bagaimana kita harus memahami bahwa agama bisa menjadi solusi terhadap berbagai masalah bangsa. Tahun 2045 dimana negara Indonesia menyongsong Indonesia Emas sangatlah tergantung bangsa ini apakah menuju ke Indonesia emas atau malah Indonesia cemas, semuanya ini tergantung kita kalau respon dan jawaban kita benar akan masalah ini maka kita akan maju dan sebaliknya jika respon dan jawaban kita salah dalam arti adanya konflik yang tiada henti yang membuat energi banyak terbuang maka masa depan bangsa ini akan terpuruk. Oleh karena itu perlu adanya kesepakatan bahwa bersatu ditengah perbedaan akan membuat kita kuat dan teguh. Hanya persoalannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa bersatu ditengah perbedaan tersebut, apalagi faktanya bangsanya sangat beragam, nah hal ini tentu dikembalikan kepada pribadi masing-masing

karena disekeliling kita banyak sekali perbedaan-perbedaan antara lain beda suku, beda budaya, dan beda agama. Hal ini tidak terlepas dari masalah interaksi-interelasi dalam perbedaan itu supaya menjadi hal yang positif atau menguntungkan bukan sebaliknya.

Di lingkungan kampus, mahasiswa yang banyak berasal dari berbagai daerah, budaya, bahasa maupun agama harus mampu berkolaborasi, berkomunikasi jangan sampai perbedaan menimbulkan konflik. Sebagai warga negara muda, mahasiswa harus paham betul bahwa bangsa ini dibangun atas keberagaman untuk itu perbedaan jangan sampai dijadikan penyebab adanya konflik, karena bukankah perbedaan tersebut adalah karya Tuhan yang indah. Mahasiswa harus mampu sebagai agen perubahan yang dapat memitigasi terjadinya bencana sosial yang dapat memecah-belah bangsa. Banyak negara di dunia ini seperti di Syria, Yaman, Sudan hancur karena gagal dalam mengelola perbedaan.

Pemerintah saat ini lebih sering mengingatkan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya moderasi beragama itu sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya bencana sosial berupa konflik horizontal yang bernuansa agama. Hal ini dikarenakan masalah pemahaman akan ajaran agama yang berbeda sehingga ada yang beranggapan bahwa ajaran agamanya yang paling benar sedangkan ajaran agama yang lain salah. Perbedaan dalam beragama ataupun dalam berbagai hal yang lain memang berpotensi untuk terjadinya konflik ketika perbedaan tersebut dipermasalahkan, sebaliknya perbedaan tentu tidak akan menjadi masalah ketika tidak dipermasalahkan. Untuk itulah semangat untuk mewujudkan moderasi beragama merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi untuk terciptanya suatu tatanan kehidupan yang damai, tenang, rukun, dan harmonis di tengah perbedaan (Saputera & H. Djauhari, 2021)

Dalam tinjauan sejarah saat negara Indonesia belum merdeka semasa penjajahan Jepang, perbincangan tentang bentuk negara apakah nanti ketika sudah merdeka negara ini menjadi negara agama dimana negaranya menyatukan urusan agama dengan negara yang mana ini merupakan usulan golongan agama atautkah menjadi negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan negara yang diusulkan oleh golongan kebangsaan telah pernah dibicarakan oleh golongan agama dan golongan nasionalis pada sidang BPUPKI. Pada akhirnya kedua golongan ini sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai penyeimbang ide dari kedua golongan tersebut. Jika berdasarkan Pancasila maka negara Indonesia tidak akan menuju kepada bentuk kedua negara tersebut tetapi negara yang ingin dituju adalah negara yang Theis Demokrasi, Negara Theis berarti negara yang berTuhan atau beragama, dan Demokrasi yang esensinya adalah kebebasan maka yang dimaksud dengan Negara Theis Demokrasi adalah negara yang berkeTuhanan yang membebaskan setiap warga negara untuk memilih dan mengimani salah satu agama yang telah diakui secara sah oleh negara.

Merujuk pada Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, perihal moderasi beragama diatur didalamnya dengan maksud agar moderasi beragama ini dalam prakteknya juga bisa diterapkan disetiap daerah. Namun demikian, ada banyak kalangan juga yang menilai bahwa moderasi beragama ini merupakan bentuk liberalisasi. Tentu hal tersebut tidaklah benar karena tujuan moderasi beragama ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran setiap warga negara akan pentingnya saling menghargai dan menghormati antar umat beragama (Saputera & H. Djauhari, 2021)

Dalam ajaran Islam, yang menjadi rujukan umat-Nya yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, artinya perilaku seseorang tidak boleh menyimpang dari keduanya tersebut, namun dalam prakteknya fenomena yang ditampilkan sangat beragam karena adanya berbagai golongan yang memiliki ciri khas yang berbeda satu dengan lainnya baik dalam hal praktik maupun amaliah keagamaannya (Nurdin, 2021). Sehingga ketika mengartikulasikannya berbeda akan memunculkan kelompok yang intoleran dan memicu adanya kekerasan.

Dalam QS. Ali Imran: 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu ber-cerai bera". Berdasarkan surat tersebut apabila kita betul-betul memahami agama, Tuhan menghendaki umat-Nya ini tetap bersatu tidak terpecah. Bersatu dalam satu iman maupun bersatu dalam iman yang berbeda. Jadi jika masih ada perilaku kekerasan di masyarakat hanya karena perbedaan agama dapatlah dikatakan pemahaman akan agamanya yang masih belum mendalam.

Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" Berdasarkan bunyi pasal 29 tersebut jelaslah setiap warga negara berhak untuk memilih agama yang akan diimaninya dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya tersebut tanpa ada ancaman atau gangguan dari umat beragama yang lain. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 ini merupakan dasar dalam menjalin dan merawat kerukunan antar umat beragama. Sejarah bangsa ini menjadi saksi bahwa para pendiri negara sepakat bahwa Indonesia bukanlah merupakan negara agama meskipun secara jumlahnya sebagian besar beragama Islam tetapi tidak berarti Indonesia menjadi negara agama atau negara Islam. Dapat pula dikatakan bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi negara yang beragama.

Moderasi beragama dapat dikatakan sebagai pilar kebangsaan dan keberagaman. Karena sikap moderat dalam beragama dapat menjaga keutuhan bangsa dan menjaga kerukunan ditengah keberagaman agama. Berbeda dengan sikap radikal atau ekstrem kiri atau kanan yang tidak menghargai perbedaan. Sikap radikal seringkali disertai dengan tindakan kekerasan, perusakan, dan pembakaran karena yang berbeda dengannya berarti musuhnya yang harus diperangi.

Moderasi beragama merupakan salah satu cara untuk mitigasi bencana sosial. Dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa mitigasi bencana adalah sebagai "upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana". Selanjutnya dalam Undang-Undang penanggulangan bencana juga dijelaskan beberapa jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Berdasarkan Undang-Undang tentang penanggulangan bencana tersebut dapatlah dijelaskan bahwasanya penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan pembangunan fisik berbagai infrastruktur yang telah rusak sebelumnya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap menghadapi ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi kembali.

Dampak dari bencana sosial berpotensi membuat kehidupan bangsa Indonesia yang beragam ini menjadi disharmonis. Moderasi beragama dapat menjadi resolusi konflik atas bencana sosial yang dilatarbelakangi paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan karakteristik bangsa (Faisal, 2020).

Penguatan Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan SK. Dirjendikti No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Perguruan Tinggi. Sebagai mata kuliah pendidikan nilai dan karakter seyogyanya Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat menjadi wadah pembelajaran moderasi beragama dengan cara menginsersi pada salah pokok bahasan atau bisa juga menjadi pokok bahasan tersendiri.

Misi PKn adalah membentuk moral dan karakter bangsa yang berintelektual tinggi, demokratis, dan memiliki akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini kepada peserta didik sejak mereka masih di sekolah dasar, hingga perguruan

tinggi agar menjadi pribadi yang Pancasilais sejati. Sebenarnya jika kelima sila Pancasila ini dipahami betul dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata setiap warga negara tentu tidak ada lagi perilaku intoleransi di bumi Indonesia.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah membentuk warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) yang memiliki ciri antara lain: memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas (*civic knowledge*), memiliki keterampilan terutama dalam hal pemecahan masalah yang ada di Masyarakat (*civic skills*), memiliki karakter atau perilaku yang baik (*civic disposition*) (Nor, 2022).

Berdasarkan tujuan PKn tersebut, mahasiswa harus peduli dengan permasalahan bangsa, mereka harus ikut berpikir dan terampil dalam menyelesaikan masalah. Dengan model pembelajaran kontekstual mahasiswa harus dapat mengaitkan apa yang telah mereka dapatkan di kelas dengan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik peduli dan mencoba mencari solusi atas masalah tersebut. Pada saat ini pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan agar dapat memenuhi tuntutan kompetensi abad 21 dimana mahasiswa memiliki kompetensi dalam hal berkomunikasi yang baik dan efektif, dapat berkolaborasi dengan yang lain, kreatif dan inovatif serta memiliki keterampilan berpikir kritis dan dapat menyelesaikan masalah. Terkait hal ini, maka pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus melibatkan mahasiswa secara lebih aktif, salah satunya dengan metode pembelajaran yang berbasis proyek (PjBL).

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada implementasi nilai-nilai yang terkandung didalam kelima Pancasila. Dalam konteks moderasi beragama ini penekannya lebih kepada implementasi nilai Sila Ketuhanan YME dan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab (Islamy, 2022).

Keberadaan sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menjelaskan bahwa negara Indonesia bukanlah merupakan negara sekuler yang mana agama dengan urusan negara terpisah sama sekali. Negara tidak mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama, negara berdiri ditengah artinya negara memberi kebebasan sepeunhnya kepada setiap warga negaranya jika ingin beragama maupun tidak beragama. Negara sekuler ini biasanya dianut di negara yang berideologi liberal, dimana hak-hak individu dijunjung tinggi daripada hak sosialnya meskipun hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya di negara yang sekuler pernikahan sesama lelaki atau sesama perempuan dilegalkan, artinya diperbolehkan meskipun sebenarnya hal itu melanggar daripada norma agama. Dalam al-Quran dinyatakan QS Al-A'raf ayat 81 yang artinya "Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada Perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas". Dalam Alkitab juga dijelaskan pada sejarah Nabi Luth dimana kaumnya mempunyai orientasi seks yang menyukai sesama jenis, hal ini jelas menyimpang dari apa yang terdapat dalam Kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke 27 "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka". Jadi jelaslah disini bahwa pernikahan sesama jenis dilarang dalam agama.

Moderasi beragama dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu proses pembelajaran dimana didalamnya mahasiswa diajarkan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan agar memiliki sikap dan perilaku yang dapat menerima, menghormati dan menghargai perbedaan dalam beragama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang mengajarkan untuk saling membenci atau memusuhi umat agama lain. Untuk menumbuhkan sikap dan perilaku toleransi atau menghargai orang lain harus dimulai dari sekolah, karena peserta didik banyak menghabiskan waktunya di sekolah (Keriapy, 2020).

Implementasi moderasi beragama dalam kehidupan nyata ditengah masyarakat yang heterogen dapat dilakukan dengan cara: 1) menerima dan menghargai perbedaan. Sikap fanatik

terhadap agamanya tentu tidak salah, namun sikap fanatik tersebut hendaknya tidak ditampilkan secara berlebihan yang mana hal tersebut dapat menimbulkan gesekan bahkan memicu adanya konflik; 2) jangan merendahkan, menghina atau mengejek agama umat lain; 3) mengadakan dialog interaktif antar umat beragama yang didasari oleh keimanan yang kokoh dari masing-masing peserta dialog sehingga tidak mudah terprovokasi; 4) senantiasa bersikap tenang dalam situasi yang mungkin dapat menimbulkan konflik, hal ini dapat mencegah terjadinya gesekan dan menjaga kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Hidup rukun dan harmonis sangatlah penting dalam negara yang heterogen. Membalas kebencian dengan kebencian tidak akan menghilangkan kebencian di atas bumi ini, kebencian hendaklah dibalas dengan kasih sayang. Dalam kitab agama Buda “Di dunia ini kebencian belum pernah berakhir, jika dibalas dengan membenci, tetapi kebencian akan berakhir, kalau dibalas dengan cinta kasih. Demikian halnya dengan kegelapan jika dibalas dengan gelap tidaklah ada terang. Ini adalah hukum kekal abadi” (Dhammapada I, 5). Dalam pemahaman agama Buda ada dua sifat yang dapat mewujudkan adanya kedamaian dunia, yaitu adanya rasa malu untuk berbuat jahat (hiri), dan rasa takut takan akibat yang ditimbulkan jika berbuat kejahatan (ottapa). Seandainya semua manusia memiliki sifat hiri dan sifat ottapa didalam dirinya kehidupan yang harmonis diantara sesama manusia tentu akan terwujud.

Strategi penguatan moderasi beragama melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan model pembelajaran berbasis masalah ataupun proyek. Mahasiswa dilatih sejak dini untuk dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada di lingkungan sekitarnya untuk dicarikan alternatif solusinya. Dengan pembelajaran seperti ini mahasiswa akan berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang ada dengan mengaitkannya dengan nilai-nilai luhur atau jati diri bangsa ini.

Ada beberapa keunggulan model pembelajaran berbasis kasus (Cased Method) dan proyek (Team-based Project) ini yaitu: 1) mahasiswa menjadi lebih aktif, mereka dapat mengembangkan potensi dan pemikiran yang ada pada mereka; 2) Mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi, mahasiswa menganalisis suatu kasus atau peristiwa yang terjadi di masyarakat khususnya yang terkait isu agama untuk diselesaikan; 3) mengembangkan kemampuan dalam bekerjasama, mahasiswa dalam satu kelompok bisa terdiri dari berbagai agama yang saling bertukar pikiran tanpa harus menunjukkan fanatisme yang berlebihan terhadap agama yang mereka anut.

Tema-tema moderasi beragama yang dapat diangkat dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kasus atau proyek ini misalnya membangun toleransi melalui dialog antar budaya dengan kolaborasi sinergitas antar mahasiswa. Bentuk luaran dari pembelajaran proyek ini dapat berupa kampanye kewarganegaraan.

Prosedur kampanye kewarganegaraan ini meliputi: 1) Mahasiswa terlebih dahulu belanja masalah dengan melakukan observasi berbagai peristiwa yang menunjukkan adanya perilaku intoleransi; 2) Mahasiswa mengidentifikasi berbagai masalah yang didapat kemudian memilih satu kasus yang urgen untuk dicarikan solusinya; 3) Mahasiswa menganalisis masalah yang dipilih dari berbagai sudut pandang secara komprehensif integral; 4) Mahasiswa merancang solusi dan menentukan luaran dari proyek tersebut yaitu bisa berupa poster, mini mural, short video, ataupun berupa karya tulis dalam bentuk jurnal; 5) pada akhir kegiatan mereka membuat laporan akhir untuk diseminarkan (Saepudin, E & Jatnika, 2019).

Selain itu Dosen yang mengajar mata kuliah PKn mempunyai peran penting dan strategis dalam membangun karakter peserta didik agar memiliki kepribadian Pancasila dalam sikap dan perbuatannya di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu Dosen PKn hendaknya memiliki kompetensi

yang baik agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik pula. Dosen juga harus memiliki perilaku yang baik karena akan dijadikan contoh (role model) bagi peserta didik (Winata et al., 2020, 99)

Agar tercapai kerukunan antar umat beragama yang berlandaskan kepada jati diri bangsa yaitu nilai-nilai Pancasila maka diperlukan konsep pendidikan berbasis moderasi beragama. Dengan adanya moderasi beragama ini seseorang didorong untuk tidak menjadi ekstrem (Nor, 2022, 191). Moderasi beragama ditujukan lebih kepada cara pandang seseorang dalam beragama jadi bukan pada agamanya karena semua ajaran agama tidak ada satupun yang mengajarkan kebencian terhadap umat agama lain. Dalam ajaran agama Kristen dikenal tentang hukum kasih, yang mengajarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, demikian juga dalam ajaran agama Islam yang mengedepankan ajarannya yang rahmatin lil alamin

Dengan demikian untuk membangun wawasan kebangsaan yang toleran terutama bagi generasi muda perlu dengan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terutama yang menyangkut penguatan moderasi beragama agar pemahaman yang keliru selama ini dalam memahami arti perbedaan dapat diminimalisir sehingga tidak meluas menjadi konflik yang dapat memecah belah bangsa Indonesia sendiri.

Simpulan

Moderasi beragama perlu ditanamkan dalam diri setiap warga negara, karena dengan adanya sikap moderat yang tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan keberagaman tidak lagi menjadi persoalan yang berpotensi memecah belah bangsa. Moderasi beragama justru untuk memperkuat dan mendudukkan ajaran agama pada jalan yang tepat yaitu mengajarkan kasih sayang kepada Tuhan dan sesamanya tanpa melihat latarbelakangnya.

Penguatan moderasi beragama melalui Pendidikan Kewarganegaraan tepat dilakukan karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berhubungan dengan nilai dan karakter. Setelah menyelesaikan perkuliahan mahasiswa memiliki sikap dan karakter religius yang ditunjukkan dengan perilakunya yang sesuai dengan ajaran agama dalam hidupnya sehari-hari.

Referensi

- ABROR, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 137–148. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- BM, S. A. (2014). Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 189–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>
- Darmalaksana, W. (2018). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan ...*, 9924, 69–81. <http://194.59.165.171/index.php/CC/article/download/68/112>
- Faisal, M. (2020). Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama Di Era Digital. *Journal of International Conference On Religion, Humanity and Development*, 195–202.
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muhtadiin*, 7(2), 111–123. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muhtadii>
- Islamy, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18–30. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v3i1.333>
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Keriapy, F. (2020). Pendidikan Kristiani Transformatif Berbasis Multikultural dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen Regula Fidei*, 5(2), 82–93.
- Nor, N. (2022). Moderasi Beragama dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *JEID: Journal of Educational Integration and Development*, 2(3), 187–197. <https://doi.org/10.55868/jeid.v2i3.141>

- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Saepudin, E & Jatnika, A. . (2019). Kampanye Kewarganegaraan Sebagai Strategi Menuju Kebermaknaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digital. Seminar Nasional: "Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia" Universitas Negeri Medan.
- Saputera, abdur rahman adi, & H. Djauhari, M. S. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama. ... *Moderasi Beragama* ..., 01(1), 41–60. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3351>
- Sutrisno. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan Dalam Membangun Wawasan Warga Negara Global. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10 (2).
- Syahrman, A., & Mulyana, A. (2021). Multikulturalisme: Analisis Wacana Buku Teks Pelajaran Sejarah. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 2(1), 17–31. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v2i1.22>
- Winata, K. A., Sudrajat, T., Yuniarsih, Y., & Zaqiah, Q. Y. (2020). Peran Dosen dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Mendukung Program Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 98–110. <https://doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.449>